

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENGAWASAN, DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya)

Dahlia Dwi Safitri

dahliadwi888@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of accountability, transparency, supervision, and budget participation on the budget performance at the Regional Work Unit of Surabaya. The research was quantitative with questionnaire as the instrument. While, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was taken based on criteria given. In line with, there were 87 respondents as sample, which taken from 19 SKPD in Surabaya. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS. The research results concluded accountability had positive effect on the budget performance since it had been proven with the implementation accountability of open budget. Likewise, transparency had positive effect on the budget performance. This happened, as the government administration was directly and open to the public. As consequence, the budget announcements could be obtained and accessed any time by the public. The supervision also had positive effect on the budget performance as it had been proven with the direct employees participation in accordance with the budget arrangement. As the result, the purpose and target within the budget had been accomplished.

Keyword : Accountability, Transparency, Supervision, Budget Participation, Budget Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan sebanyak 87 responden yang didapat dari 19 SKPD Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran karena hal ini dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terbuka. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, hal ini dibuktikan karena pada penyelenggaraan pemerintah dilakukan secara terbuka pada masyarakat umum sehingga pengumuman anggaran dapat diperoleh dan diakses setiap saat oleh publik. Pengawasan juga berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran hal ini dibuktikan dengan adanya metode pengawasan anggaran daerah sesuai dengan undang-undang secara efektif. Sedangkan partisipasi anggaran menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja anggaran hal ini dibuktikan dengan terlibatnya para pegawai secara langsung dalam proses penyusunan anggaran akan dapat menentukan tujuan dan target di dalam anggaran.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Partisipasi Anggaran, Kinerja Anggaran

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik mendapat perhatian yang semakin besar, baik akuntansi sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam kegiatan mengelola anggaran, akuntabilitas dan transparansi sangat penting dilakukan karena hasil akhir dari pengelolaan tersebut harus diberikan secara terbuka kepada publik serta

dipertanggungjawabkan. Pertiwi (2015) menyatakan bahwa salah satu tuntutan yang paling penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik. Tuntutan untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana yang dimiliki secara efektif dan efisien merupakan konsekuensi bagi daerah. Dalam mengimplikasikan pertumbuhan daerah yang berjalan sesuai keinginan menjadikan pengalokasian dana yang sebaik-baiknya.

Akhir-akhir ini terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran di suatu instansi pemerintah. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah sering terjadi sehingga masyarakat mempertanyakan kinerja pemimpin daerah, Sadjarto (dalam Adiwirya dan Sudana, 2015:613). Beragam kasus menimbulkan dampak kepada publik dan terjadi di kota-kota besar yang mengisyaratkan kota-kota lainnya berpotensi juga terjadi penyimpangan. Terdapat permasalahan yang lain yakni kelemahan perencanaan kinerja anggaran dalam pengalokasian anggaran belanja sehingga mengakibatkan lemahnya kinerja pemerintah, sehingga ada yang kekurangan pembiayaan pada unit kerja dan ada pula yang kelebihan pembiayaan pada unit kerja.

Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas merupakan setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber, dan penggunaan wewenang harus diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. Transparansi memiliki arti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam hal pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan serta berhubungan dengan suatu keputusan perlu memegang akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Transparansi dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu kebijakan terbuka terhadap pengawasan, akses informasi sehingga masyarakat sebagai prinsipal bisa menjangkau tiap segi kebijakan pemerintah sebagai agen, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan karena dalam penyusunan dan proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas yang bertugas untuk meminimalisasi tindakan yang menyimpang dalam pembuatan anggaran dan dapat memenuhi sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya (Halim dan Kusufi, 2012:191). Pengawasan anggaran dibutuhkan untuk mengetahui perencanaan yang sudah disusun tersebut dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *Value for Money*. *Value for Money* dapat dicapai apabila suatu organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum untuk mencapai tujuan organisasi.

Faktor lain untuk mencapai pengelolaan anggaran yang baik adalah adanya partisipasi anggaran. Partisipasi merupakan keikutsertaan perseorangan secara mental dan emosional di dalam organisasi demi tercapainya cita-cita serta melakukan pertanggungjawaban bersama-sama. Dengan melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan penganggaran, pegawai akan termotivasi karena adanya kesempatan untuk mewujudkan kreatifitas dan inovasinya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat diuraikan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : a) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran; b) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran; c) Apakah Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran; d) Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran; b) Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran; c) Untuk menguji pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran; d) Untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan keagenan, yaitu suatu kontrak penugasan dari pemilik (*principal*) kepada pekerja (*agent*) untuk melakukan beberapa pekerjaan yang sesuai kepentingan *principal* melalui pendelegasian sebagian otoritas pembuatan keputusan kepada *agent*. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan hubungan sebuah pertanggungjawaban, dalam hal ini pemerintah sebagai *agen* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada masyarakat yang telah memberi dana (*public fund*). Peraturan perundang-undangan pemerintah secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik (Mahmudi, 2005:8).

Konsep akuntabilitas dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*, dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002:20).

Alasan pemilihan teori keagenan ini adalah untuk mewujudkan hubungan pertanggungjawaban antara pemerintah dan masyarakat. Jadi teori keagenan sangat relevan untuk menerangkan maksud dari penelitian tersebut.

Akuntabilitas

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas meliputi keberadaan yang dapat meyakinkan pejabat pemerintahan dan politisi terhadap tindakannya dalam penggunaan sumber sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas sangat terkait dengan pertanggungjawaban pada efektivitas kegiatan dalam mencapai target atau saran kebijakan atau program.

Dalam hal birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tujuan instansi tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, antara lain: 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja pada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR; 2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Ellwood, 1993 (dalam Mardiasmo, 2009) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum; 2) Akuntabilitas proses; 3) Akuntabilitas program; 4) Akuntabilitas kebijakan.

Transparansi

Selain akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga dibutuhkan dalam meningkatkan pengawasan. Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* adalah transparansi. Transparansi dibentuk atas arus informasi yang bebas, seluruh informasi, proses pemerintahan, dan lembaga-lembaga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang ada harus mencukupi agar dapat dipantau dan dimengerti.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi (Adisasmita, 2011:39). Menurut Adiwirya dan Sudana (2015) ada empat indikator yang mempengaruhi transparansi yaitu : 1) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah; 2) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab; 3) Kemudahan akses informasi; 4) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Pengawasan

Pengawasan merupakan tindakan untuk menjaga dan menjamin pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana, tujuan, dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan adalah seluruh kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan seseuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang sudah ditetapkan (Halim, 2002:146).

Secara garis besar terdapat beberapa tujuan pengawasan keuangan daerah, (Halim dan Kusufi, 2012:147) yaitu: 1) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan keuangan daerah; 2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; 3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai usaha penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, yang merupakan sepenuhnya adalah tanggungjawab pimpinan pada tingkat manapun. Prinsipnya pengawasan yaitu mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kesalahan, dan kegagalan sedini mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek, sifat, dan metode pengawasan (Halim, 2002:150), yaitu: 1) Pengawasan berdasarkan objek; 2) Pengawasan berdasarkan sifat; 3) Pengawasan berdasarkan metode.

Partisipasi Anggaran

Menurut Hansen dan Mowen (2009:440) partisipasi anggaran merupakan pendekatan penganggaran yang memungkinkan manajer tingkat bawah untuk berpartisipasi atau ikut serta untuk mengembangkan anggaran dan partisipasi anggaran juga mengkomunikasikan rasa tanggung jawab pada manajer tingkat bawah serta mendorong kreativitas. Salah satu unsur yang sangat penting yang menekankan kerjasama dari berbagai pihak merupakan partisipasi. Dengan istilah lain bahwa anggaran yang dianggarkan tidak hanya ditentukan oleh atasan semata, tetapi karena adanya keterlibatan bawahan di dalamnya.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2012) partisipasi dalam penyusunan anggaran dibedakan menjadi tiga kelompok, antara lain: 1) *Top down approach* (bersifat dari atas ke bawah); 2) *Bottom up approach* (bersifat dari bawah ke atas); 3) Kombinasi *top down* dan *bottom up*. Partisipasi anggaran merupakan salah satu cara untuk melahirkan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan institusi yang terkait. Dengan adanya partisipasi maka peningkatan kepuasan dan pegawai akan lebih produktif akhirnya menimbulkan perasaan berprestasi yang mendorong peningkatan kinerja. Menurut Damayanti, 2014 (dalam Premananda, 2016) indikator yang diukur antara lain: 1) Keterlibatan dalam penyusunan anggaran; 2) Pengaruh dalam penyusunan anggaran; 3) Komitmen dalam penyusunan anggaran.

Kinerja Anggaran

Menurut Bastian (2010:92) kinerja anggaran merupakan teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan 30 unit *cost* dari tiap kegiatan yang terstruktur. Terstruktur ini dimulai dari pencapaian tujuan, program dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Sedangkan menurut Halim (2007) mengartikan kinerja anggaran sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk menghubungkan tiap pendanaan yang diuangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa anggaran pemerintah adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai belanja yang disusun untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau biaya yang dibutuhkan apabila diperkirakan akan terjadi surplus atau defisit, maka anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan member landasan bagi usaha memperoleh pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk periode tertentu yang umumnya meliputi periode tahunan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinann akan disiapkan anggaran untuk jangka waktu kurang atau lebih dari setahun. Kinerja anggaran merupakan potensi pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Mardiasmo, 2009:4 (dalam Aprianti, 2017) ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja anggaran berkonsep *value for money* yaitu: 1) Ekonomis, 2) Efisien, 3) Efektivitas.

Konsep Value for Money

Mardiasmo (2009:4) mengemukakan bahwa *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, antara lain: 1) Ekonomi merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah dimana *input* adalah sumber daya yang difungsikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, aktivitas, dan program; 2) Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi adalah perbandingan *output* dan *input* yang berkaitan dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan; 3) Efektivitas merupakan ukuran pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Semakin besar *output* yang dihasilkan maka semakin efektif proses kinerja suatu unit organisasi.

Halim dan Kusufi (2012:12) menyatakan bahwa *value for money* sangat bermanfaat dan penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada publik, antara lain: 1) Efektivitas pelayanan publik; 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik; 3) Menghilangkan setiap inefisien dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi lebih rendah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya; 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; 5) Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar dari akuntan publik.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran

Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggungjawaban pada proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan pemerintah untuk menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan

hanya pertanggungjawaban vertikal. Jadi pemerintah kota Surabaya harus mempertahankan dan meningkatkan prinsip akuntabilitas yaitu prinsip pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja anggaran agar dapat menjadikan pemerintah lebih baik lagi. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil penelitian dari Putri (2017) dalam menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Pertiwi (2015) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Dengan demikian ketika akuntabilitas dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan tercapainya kinerja anggaran

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis, bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* karena pada pelaksanaan anggaran dibutuhkan pertanggungjawaban dan terbuka untuk diperiksa agar efisiensi dan efektivitas dapat terjamin, sehingga tujuan dan sasaran dapat berhasil dicapai.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran

Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan untuk mengakses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang ada harus memadai agar mudah dimengerti oleh publik. Transparansi ditinjau dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat mencapai tiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara eksekutif dan legislatif.

Hasil penelitian dari Putri (2017) dalam menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Aprianti (2017) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah. Dengan demikian ketika transparansi dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan terwujudnya kinerja anggaran. Transparansi dapat dikatakan baik apabila pemerintah dapat memberikan kemudahan agar pengumuman anggaran dapat diperoleh setiap saat dan mudah diakses oleh publik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis, bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* karena pada penyelenggaraan pemerintah harus terbuka pada masyarakat umum agar pengumuman anggaran dapat diperoleh setiap saat dan mudah diakses oleh publik.

H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran

Pengawasan adalah segala tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang sudah ditentukan. Pengawasan anggaran daerah dilakukan untuk meminimalisir kebocoran anggaran daerah dengan metode pembukuan yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk mengurangi adanya penyimpangan serta hambatan dalam kinerja anggaran, maka dari itu pemerintah melakukan pengawasan anggaran secara internal maupun eksternal.

Hasil penelitian dari Putri (2017) dalam menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Pertiwi (2015) juga menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Dengan

demikian ketika pengawasan dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan terwujudnya kinerja anggaran. Kinerja anggaran akan terlaksana dengan baik dan benar apabila pengawasan dilakukan secara rutin dan langsung melalui kinerja bawahan pengguna anggaran.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis, bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* karena pengawasan anggaran dilakukan untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan metode pengawasan anggaran daerah sesuai dengan undang-undang secara efektif.

H3 : Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran

Partisipasi anggaran merupakan salah satu cara untuk melahirkan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan institusi yang terkait. Dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan dapat menunjang kinerja dari suatu instansi pemerintahan dan menjadi sarana akuntansi terbaik untuk tiap individu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Arti partisipasi dalam Pemerintah Daerah adalah keterlibatan SKPD dalam penyusunan anggaran daerah.

Dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran, para pegawai pemerintahan diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri mereka yang pada gilirannya mengeksplor kemampuan mereka dalam menentukan tujuan dan sasaran yang tercermin dalam anggaran. Proses ini akan berujung pada internalisasi tujuan dan sasaran yang ada dalam anggaran sehingga mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai hal tersebut.

Pegawai atau kepala dalam suatu divisi/bagian/unit organisasi merupakan orang yang memiliki informasi yang paling memadai mengenai divisi/bagian/unit di mana mereka bekerja. Melibatkan mereka dalam proses penyusunan anggaran berarti menyusun anggaran dengan menggunakan sumber informasi yang paling relevan. Proses ini akan menghasilkan anggaran dengan tingkat capaian yang lebih realistis yang dapat dicapai oleh para pegawai. Hal ini akan memudahkan mereka untuk mencapai hal-hal yang ditargetkan dalam anggaran yang berarti peningkatan kinerja.

Hasil penelitian dari Premananda (2016) dalam menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Kartika (2008) juga menyatakan bahwa partisipasi dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja manajerial dan interaksi antara partisipasi anggaran dan motivasi berimplikasi secara signifikan terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis, bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* karena partisipasi anggaran dilakukan untuk meningkatkan kinerja manajerial atasan di satuan kerja dan kemudian meningkatkan kinerja pemerintah menyeluruh.

H4 : Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan bentuk survei dalam pengambilan datanya. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka, presentase atau penilaian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang dapat dilakukan melalui studi dengan menggunakan metode Kausal Komparatif (*Causal-Comparative Research*). Penelitian Kausal Komparatif adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah

berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Tipe penelitian tersebut dengan *Ex post facto* yaitu penelitian dilakukan terhadap data-data yang dikumpulkan setelah terjadinya fakta atau peristiwa. Penelitian ini berdasarkan data primer, data primer adalah sumber data informasi yang didapatkan peneliti secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini melihat seberapa besar pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya yang berjumlah 19 SKPD.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel merupakan cara peneliti mengambil sampel atau contoh representative dari populasi yang tersedia (Sanusi, 2014:88). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti (Sekaran, 2006). Objek yang digunakan adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kota Surabaya dengan kriteria Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, Bendahara dan beberapa staff keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini terkait dengan jenis data subjek (*Self-Report Data*) yang merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).

Sumber data yang digunakan merupakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu hasil pengisian kuisioner oleh responden.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner atau daftar pernyataan kepada responden yang telah disusun secara sistematis. Kuesioner disusun untuk mendapatkan data dan informasi mengenai akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran, dan kinerja anggaran.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas

Akuntabilitas, merupakan prinsip pertanggungjawaban pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk memberikan informasi dan penyingkapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat empat indikator yang mempengaruhi akuntabilitas (Mardiasmo, 2009) yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum; 2) Akuntabilitas proses; 3) Akuntabilitas program; 4) Akuntabilitas kebijakan.

Transparansi

Transparansi, adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Terdapat empat indikator yang mempengaruhi transparansi (Adiwirya dan Sudana, 2015) yaitu: 1) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemeritahan; 2) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan

tanggungjawab; 3) Kemudahan akses informasi; 4) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Pengawasan

Pengawasan, merupakan untuk menjamin agar anggaran benar-benar sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuannya yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Terdapat tiga indikator yang mempengaruhi pengawasan (Gaspersz, 1998:287), yaitu: 1) Input (masukan) pengawasan, 2) Proses pengawasan, 3) output (keluaran) pengawasan.

Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran merupakan salah satu cara untuk melahirkan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan institusi yang terkait. Dengan adanya partisipasi maka peningkatan kepuasan dan pegawai akan lebih produktif akhirnya menimbulkan perasaan berprestasi yang mendorong peningkatan kinerja. Menurut Damayanti, 2014 (dalam Premananda, 2016) indikator yang diukur antara lain: 1) Keterlibatan dalam penyusunan anggaran; 2) Pengaruh dalam penyusunan anggaran; 3) Komitmen dalam penyusunan anggaran

Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran, merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja anggaran berdasarkan *value for money*, (Mardiasmo, 2009:4) antara lain: 1) Ekonomis, 2) Efisien, 3) Efektivitas.

Teknik Analisis Data

Alat analisis regresi tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas (AK), transparansi (TP), pengawasan (PW), dan Partisipasi Anggaran (PA), sedangkan variabel terikat atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran berkonsep *value for money* (KA). Menurut Sugiyono (2014:277) Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya, analisis ini dilakukan pada saat suatu penelitian terdapat minimal dua variabel independennya. Formulasi persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KA = \alpha + \beta_1AK + \beta_2TP + \beta_3PW + \beta_3PA + e$$

Keterangan :

AK	: Kinerja Anggaran
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas
AK	: Akuntabilitas
TP	: Transparansi
PW	: Pengawasan
PA	: Partisipasi Anggaran
e	: Standar Error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ke SKPD yang dijadikan tempat penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung pada 19

SKPD yang terdiri dari 15 Dinas dan 4 Badan. Kuesioner yang dibagikan untuk setiap SKPD sebanyak 5 kuesioner, sehingga jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 95 kuesioner. Jumlah kuisisioner yang kembali sebanyak 87 kuisisioner, namun kuisisioner yang tidak dapat diolah sebanyak sebanyak 8 kuisisioner.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan atau pernyataan pada kuisisioner yang harus dihilangkan atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisisioner, apakah item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur (Ghozali, 2011:45). Dalam rangka mengetahui uji validitas, dapat digunakan koefisien korelasi yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of significance*) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah sah/valid sebagai pembentuk indikator.

Berdasarkan hasil uji yang didapat menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas indikator dari semua variabel bebas maupun variabel terikat menunjukkan hasil yang valid, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa semua variabel penelitian telah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur apakah jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuisisioner tetap konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur hasil uji reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel > 0,60 maka dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2016: 43).

Berdasarkan hasil SPSS yang didapat untuk nilai *cronbach alpha* yaitu untuk AK (0,714); TP (0,733); PW (0,707); PA (0,706); KA (0,721). Dari semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0.6 sehingga data tersebut dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai fungsi yang digunakan untuk dapat mengetahui gambaran atau deskripsi yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, standar deviasi yang diperoleh dari variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif akan disajikan pada gambaran masing-masing tiap variabel penelitian yaitu variabel dependen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang sebagai variabel independen yaitu, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Hasil dari uji statistik deskriptif dari variabel penelitian disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AK	87	2.43	4.00	3.2499	.34375
TP	87	2.25	4.00	3.2570	.37347
PW	87	2.56	3.89	3.3029	.30633
PA	87	2.17	4.00	3.2146	.37631
KA	87	2.55	4.00	3.3582	.32194
Valid (listwise)	87				

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kualitas jawaban minimum responden sebesar 2,43, maksimum

sebesar 4, dengan rata-rata 3,2499, dan standar deviasi sebesar 0,34375. Variabel transparansi menunjukkan nilai minimum sebesar 2,25, maksimum sebesar 4, dengan rata-rata sebesar 3,2570, dan standar deviasi sebesar 0,37347. Variabel pengawasan menunjukkan nilai minimum sebesar 2,56, maksimum sebesar 3,89, dengan rata-rata sebesar 3,3029, dan standar deviasi sebesar 0,30633. Variabel partisipasi anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 2,17, maksimum sebesar 4, dengan rata-rata sebesar 3,2146, dan standar deviasi sebesar 0,37631. Variabel kinerja anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 2,55, maksimum sebesar 4, dengan rata-rata sebesar 3,3582, dan standar deviasi sebesar 0,32194.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran instansi pemerintah Kota Surabaya. Data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS, maka dihasilkan persamaan regresi linear berganda yang dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,100	2,197		1,411	0,162
AK	0,510	0,128	0,347	3,992	0,000
TP	0,230	0,111	0,194	2,078	0,041
PW	0,221	0,079	0,172	2,806	0,006
PA	0,503	0,136	0,322	3,685	0,000

a. Dependent Variable: KA

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda yaitu

$$KA = 3,100 + 0,510 AK + 0,230 TP + 0,221 PW + 0,503 PA + e$$

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016: 154) uji normalitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji model regresi variabel yang diteliti apakah berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal; 2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,654 yang mana artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Tabel 3
Hasil uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.Deviation	1,63443957
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,037
	Negative	-,079
Test Statistic		,734
Asymp. Sig. (2-tailed)		,654

- a. Test Distribution is Normal
b. Calculated from data
c. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji atau mendeteksi ada tidaknya korelasi antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2016: 103). Apabila telah diuji dan ditemukannya terdapat korelasi maka terdapat *problem multikolinearitas*. Untuk mengetahui apakah terjadi *problem multikolinearitas* atau tidak yaitu dengan melihat besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Apabila angka *tolerance* dari suatu model regresi kurang dari 0,1 serta $VIF > 10$ hal tersebut berarti terdapat *problem multikolinearitas*.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

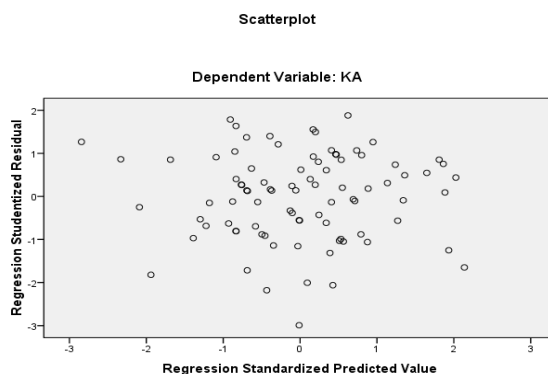
Model	Coefficient ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
AK	0,345	2,897
TP	0,299	3,345
PW	0,693	1,443
PA	0,342	2,924

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai *Tolerance* tiap variabel menunjukkan nilai lebih dari 0,10 dan VIF dari masing-masing variabel juga menunjukkan nilai dibawah angka 10, maka dapat dikatakan seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dengan hasil tersebut variabel dapat digunakan karena bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi, serta menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan deviasi standar nilai pada variabel dependen disetiap variabel independennya dalam suatu model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik *plot* atau *scatterplot*. Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang teratur maka dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas. Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134).



Sumber: Data Primer diolah (2019)

Gambar 1
Grafik Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dijabarkan bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa grafik scatterplot membuktikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Koefesien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengukur kuat atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berarti R² yang diperoleh mendekati satu. Apabila R² mendekati nol maka semakin lemah hubungan antara keduanya. Variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen yaitu yang memiliki nilai mendekati satu (Ghozali, 2016: 95).

Tabel 5
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,828	0,686	0,671	2.50788

a. Predictors: (Constant), AK, TP, PW, PA

b. Dependent Variable: KA

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,686 yang berarti menunjukkan bahwa kinerja anggaran instansi pemerintah Kota Surabaya dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran. Sedangkan sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam model penelitian. Dilihat dari nilai R² yang mendekati angka 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian. Model dapat dikatakan layak, apabila hasil pengolahan data yang dihasilkan dengan bantuan SPSS nilai signifikansinya < 0,05. Sehingga dapat diketahui apakah model termasuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak. Berikut hasil uji f dapat dilihat pada tabel 6:

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1126.333	4	281.583	44.771	.000 ^a
	Residual	515.736	82	6.289		
	Total	1642.069	86			

a. Predictors: (Constant), AK, TP, PW, PA

b. Dependent Variable: KA

Sumber: Data Primerdiolah (2019)

Berdasarkan pada tabel 6 diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 44,771 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran instansi pemerintah Kota Surabaya. Sehingga uji model dikatakan layak atau cocok (*fit*) digunakan dalam penelitian ini.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh disetiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2016: 99). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka koefisien regresi signifikan. Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,100	2,197		1,411	0,162
	AK	0,510	0,128	0,347	3,992	0,000
	TP	0,230	0,111	0,194	2,078	0,041
	PW	0,221	0,079	0,172	2,806	0,006
	PA	0,503	0,136	0,322	3,685	0,000

a. Dependent Variable: KA

Sumber: Data Primerdiolah (2019)

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas akuntabilitas terhadap variabel terikat kinerja anggaran. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran yang memiliki arti apabila kinerja anggaran tersebut baik itu dipengaruhi oleh akuntabilitas yang baik dalam organisasi pemerintah tersebut. Akuntabilitas yang baik disebabkan karena terdapat organisasi pemerintah yang

menjalankan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku dengan baik, adanya seseorang atau karyawan yang memiliki akuntabilitas tinggi dan dapat menimbulkan kinerja organisasi yang baik, serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga dapat menimbulkan kinerja anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi pemerintah tersebut.

Jadi pemerintah kota Surabaya harus tetap mempertahankan dan meningkatkan prinsip akuntabilitas yaitu prinsip pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja anggaran agar dapat menjadikan pemerintah lebih baik lagi. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Putri (2017) dalam menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika akuntabilitas dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan tercapainya kinerja anggaran. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Pertiwi (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas transparansi terhadap variabel terikat kinerja anggaran. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran yang memiliki arti apabila kinerja anggaran tersebut baik itu dipengaruhi oleh transparansi yang baik dalam organisasi pemerintah tersebut. Transparansi yang baik disebabkan karena baiknya komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan publik seperti anggaran yang selalu dikomunikasikan melalui media massa secara terbuka dan hak masyarakat terhadap akses informasi seperti informasi yang cukup diberikan kepada publik tentang prosedur dan tanggung jawab organisasi pemerintah. Sehingga dapat menimbulkan kinerja anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi pemerintah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) dalam menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika transparansi dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan terwujudnya kinerja anggaran. Transparansi dapat dikatakan baik apabila pemerintah dapat memberikan kemudahan agar pengumuman anggaran dapat diperoleh setiap saat dan mudah diakses oleh publik. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Aprianti (2017) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah.

Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pengawasan terhadap variabel terikat kinerja anggaran. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran yang memiliki arti apabila kinerja anggaran tersebut baik itu dipengaruhi oleh pengawasan yang baik dalam organisasi pemerintah tersebut. Pengawasan yang baik disebabkan karena adanya tindakan koreksi yang dilakukan karena adanya penyimpangan serta hambatan dalam kinerja anggaran seperti, pengawasan anggaran yang

dilakukan secara internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) dalam menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika pengawasan dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan terwujudnya kinerja anggaran. Kinerja anggaran akan terlaksana dengan baik dan benar apabila pengawasan dilakukan secara rutin dan langsung melalui kinerja bawahan pengguna anggaran. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Pertiwi (2015) juga menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas partisipasi anggaran terhadap variabel terikat kinerja anggaran. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran yang memiliki arti apabila kinerja anggaran tersebut baik itu dipengaruhi oleh partisipasi anggaran yang baik dalam organisasi pemerintah tersebut. Partisipasi anggaran yang baik disebabkan karena adanya keikutsertaan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran disemua posisi yang menjadi tanggungjawab karyawan dan adanya komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan untuk menyalurkan pendapat atau usulan tentang anggaran.

Dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran, para pegawai pemerintahan diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri mereka yang pada gilirannya mengeksplor kemampuan mereka dalam menentukan tujuan dan sasaran yang tercermin dalam anggaran. Proses ini akan berujung pada internalisasi tujuan dan sasaran yang ada dalam anggaran sehingga mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai hal tersebut.

Pegawai atau kepala dalam suatu divisi/bagian/unit organisasi merupakan orang yang memiliki informasi yang paling memadai mengenai divisi/bagian/unit di mana mereka bekerja. Melibatkan mereka dalam proses penyusunan anggaran berarti menyusun anggaran dengan menggunakan sumber informasi yang paling relevan. Proses ini akan menghasilkan anggaran dengan tingkat capaian yang lebih realistis yang dapat dicapai oleh para pegawai. Hal ini akan memudahkan mereka untuk mencapai hal-hal yang ditargetkan dalam anggaran yang berarti peningkatan kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Premananda (2016) dalam menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Hal ini dikarenakan apabila para pegawai pemerintahan terlibat secara langsung dalam proses penyusunan anggaran akan dapat mengaktualisasi diri yang pada akhirnya dapat mengeksplor kemampuan mereka dalam menentukan tujuan dan target di dalam anggaran. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika partisipasi anggaran dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan terwujudnya kinerja anggaran. Kartika (2008) juga menyatakan bahwa partisipasi dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja manajerial dan interaksi antara partisipasi anggaran dan motivasi berimplikasi secara signifikan terhadap kinerja manajerial.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 1)

Hasil penelitian ini menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi akuntabilitas pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah; 2) Hasil penelitian ini menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi transparansi pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah; 3) Hasil penelitian ini menyatakan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi pengawasan pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah; 4) Hasil penelitian ini menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi partisipasi anggaran pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah.

Saran

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan, namun demikian masih memiliki keterbatasan, antara lain: 1) Adanya keterbatasan penelitian pada pengisian kuisioner yang terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Dilengkapi dengan adanya wawancara; 2) Variabel penelitian dalam penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran, sedangkan terdapat variabel lain yang mempengaruhi kinerja anggaran yang belum diteliti.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti, antara lain: 1) Untuk peneliti selanjutnya hendaknya melakukan wawancara kepada responden untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden dan data yang diperoleh jelas dan valid; 2) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kinerja anggaran instansi pemerintah daerah, serta dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian agar data yang dihasilkan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adiwirya, M. F. dan I. P. Sudana. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11(2).
- Anthony, R. N. dan V. Govindarajan. 2012. *Management Control Systems*. Terjemahan Bakir, R. S., Prihantini dan N, Harini. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 12 Jilid Dua. Karisma Publishing Group. Tangerang.
- Aprianti, E. R. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Ketiga. Erlangga. Yogyakarta.
- Gaspersz, V. 1998. *Production Planning and Inventory Control*. PT Sun. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.

- Hansen, D. R. dan M. M. Mowen. 2009. *Managerial Accounting*. Terjemahan Kwary dan Deny A. 2009. *Akuntansi Manajerial*. Buku 1 Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
- Kartika, W. R. 2008. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan APBD Berbasis Anggaran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai Moderating Variabel (Survey pada Pemerintahan Daerah Se-Eks Karisidenan Surakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pertiwi, D. P. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* 2(2).
- Premananda, N. P. U. 2016. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *Skripsi*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Putri, R. R. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

